

**STRATEGI PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN
PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

**NIA OCTAVIA
NPM 2320041020**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

STRATEGI PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

NIA OCTAVIA

Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kota Bandar Lampung merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk melindungi nelayan kecil dari risiko pekerjaan. Program ini juga dirancang untuk mendorong nelayan agar melanjutkan kepesertaan asuransi secara mandiri setelah bantuan berakhir. Rendahnya keberlanjutan kepesertaan dalam program BPAN menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam pengelolaan program. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelembagaan dalam program asuransi nelayan dan strategi dalam upaya meningkatkan minat nelayan dalam kepesertaan secara mandiri. Metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap 11 informan kunci, pengamatan terlibat, *Fokus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumentasi. Analisis data dengan mengkaji kelembagaan berdasarkan situasi, struktur, perilaku, dan kinerja, serta analisis SWOT dilakukan terhadap dua lembaga pengelola program untuk menentukan strategi yang efektif dalam meningkatkan minat kepesertaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya program BPAN belum tercapai di tahun kedua. Peralihan operator penyedia layanan asuransi dari PT Jasindo ke BPJS Ketenagakerjaan tidak menunjukkan perubahan signifikan terhadap kepesertaan nelayan secara mandiri. Nelayan enggan membayar premi mandiri karena mereka lebih memilih dilayani langsung dalam proses pembayaran. Analisis SWOT menunjukkan strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan minat kepesertaan nelayan secara mandiri berada pada titik kuadran SO, dimana strategi yang digunakan dengan menggunakan kekuatan untuk mencangkup peluang. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan rancangan regulasi dan perjanjian yang harus dipenuhi oleh nelayan, agar menjadi aturan yang mengikat. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku penyedia asuransi perlu memperkuat *personal selling*, berkolaborasi dengan aktor lokal sebagai agen untuk mempermudah pembayaran premi.

Kata Kunci: *Asuransi nelayan, Risiko kerja, Kelembagaan, Perilaku, Kinerja, SWOT*

ABSTRACT

STRATEGY FOR MANAGING THE FISHERIES INSURANCE PREMIUM ASSISTANCE PROGRAM (BPAN) IN BANDAR LAMPUNG CITY.

**By
NIA OCTAVIA**

The Fishermen Insurance Premium Assistance Program (BPAN) in Bandar Lampung City is a government initiative to protect small fishermen from occupational risks. The program aims to motivate fishermen to maintain their insurance membership independently once the assistance period is over. The low sustainability of participation in the BPAN program indicates a problem management challenge. This study aims to analyze the institutional framework of the fishermen's insurance program and identify strategies to enhance fishermen's motivation for independent participation in Bandar Lampung City. This study used the case study method as a qualitative approach. Data were obtained by in-depth interviews with 11 key informants, participant observation, Focus Group Discussions (FGD), and document analysis. Data analysis involved examining institutions based on their situations, structures, behaviors, and performance, along with a SWOT analysis to identify effective strategies for increasing participant interest in the two program management institutions.

The study results show that the insurance program in Bandar Lampung City has not succeeded in protecting fishermen in the second year. The transition in insurance service providers from PT Jasindo to BPJS Ketenagakerjaan did not significantly improve fishermen's independent participation. Fishermen are hesitant to pay premiums independently, preferring direct service during the payment process. The SWOT analysis shows that strategies that can be carried out to increase independent participation among fishermen are positioned at the SO quadrant point, where the strategy used is to leverage existing strengths to take advantage of available opportunities. The government should consider formulating regulations and agreements that fishermen must comply with, making them binding. Additionally, BPJS Ketenagakerjaan, as the insurance provider, should enhance personal selling efforts by partnering with local stakeholders to act as agents, helping to ease the premium payment process.

Keywords: Fishermen's insurance, occupational risks, institutions, behavior, performance, SWOT.

**STRATEGI PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN
PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

NIA OCTAVIA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **STRATEGI PENGELOLAAN PROGRAM
BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN
(BPAN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Nia Octavia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2320041020**

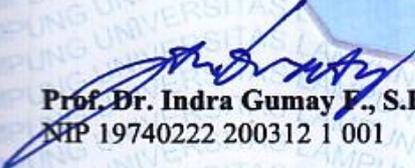
Program Studi : **Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut**

Fakultas : **Pascasarjana Multidisiplin**



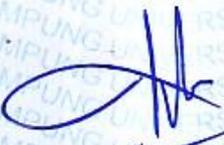
MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Indra Gumay F., S.Hut., M.Si.
NIP 19740222 200312 1 001


Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.
NIP 19690601 199802 1 002

2. **Ketua Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut
Universitas Lampung**


Dr. Nur Etendi, S.Sos., M.Si.
NIP. 19691012 199512 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

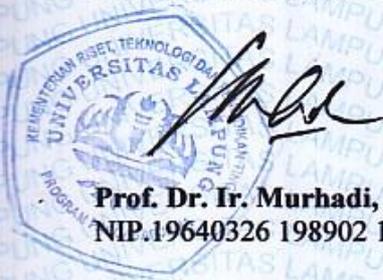
Ketua : Prof. Dr. Indra Gumay F., S.Hut., M.Si.

Sekretaris : Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.**

Anggota : Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP.19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 16 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **"STRATEGI PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Nia Octavia
NPM. 2320041020

RIWAYAT HIDUP



Penulis Nia Octavia di lahirkan pada tanggal 02 Oktober 1988 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan suami istri Bapak Syarifudin dan Ibu Evalawati, MM. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Langkapura. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Lampung. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 7 Bandar Lampung. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Program Studi Teknologi Akuakultur. Saat ini penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2023 Penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 pada Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut di Universitas Lampung. Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Di Kota Bandar Lampung”.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya tulis ini kepada yang tercinta:

Anak-anakku

Lashira Adreana Kinar dan M. Athazaky Kamil

Suamiku Kardinal

Bapakku Syarifudin dan Mamaku Evalawati

Adik-adikku Dimas dan Dicky

yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan motivasi selama pendidikan dan penyelesaian TESIS.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis Dengan Judul **“Strategi Pengelolaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Di Kota Bandar Lampung”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Wilayah Pesisir dan Laut atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis;
4. Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku pembimbing utama atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, saran dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis;
5. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D., selaku pembimbing kedua atas kesediannya memberikan bimbingan, masukan, arahan, saran dan motivasi dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S., selaku Dosen Penguji pertama atas semua masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis;
7. Dr. Ir. Abdulah Aman Damai, M.S., selaku Dosen Penguji kedua atas semua masukan dan saran yang telah diberikan kepada penulis;

8. Dr. Indra Gumay Yudha, S.Pi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, motivasi kepada penulis;
9. Dr. Supono, S.Pi., M.Si. (Alm.), yang sempat menjadi pembimbing kedua dengan sabar dalam memberikan masukan, saran, motivasi dalam menentukan tema penelitian kepada penulis;
10. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku pakar kebijakan publik yang telah memberikan dukungan pemikiran, pendapat, dan arahan kepada penulis;
11. Teruntuk Bapak Syarifudin dan Mama Evalawati, Dimas, Dicky. Terimakasih untuk setiap doa, motivasi, serta kasih sayang di sepanjang hidup ini;
12. Suami tercinta, Kardinal, atas kesabaran, doa, dukungan, dan motivasinya yang telah diberikan kepada istrinya;
13. Anak-anak kecilku tersayang, Lashira Adreena Kinar dan M. Athazaky Kamil, terima kasih atas pengertian, semangatnya, dan maaf untuk waktu yang terbatas dalam mendampingi kalian.
14. Seluruh Dosen Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut Universitas Lampung atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa;
15. Bapak dan Ibu Staf administrasi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut Universitas Lampung.
16. Seluruh penyuluh perikanan Kota Bandar Lampung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, atas dukungan dan bantuannya selama penulis dalam penelitian dan penyusunan tesis;
17. Teman-teman pascasarjana Magister Wilayah Pesisir dan Laut angkatan 2023 atas dukungan dan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi adanya harapan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, Desember 2024

Nia Octavia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kelembagaan	10
2.2 Nelayan Kecil	13
2.3 Risiko.....	16
2.4 Asuransi	19
2.5 Asuransi Nelayan.....	21
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
3.2 Alat dan Bahan	26
3.3 Pendekatan Penelitian.....	26
3.4 Pengambilan Sampel	27
3.5 Metode Pengumpulan Data	28
3.6 Metode Analisis Data	31

3.6.1	Kinerja Kelembagaan dalam Program BPAN dengan <i>Analisis Situation, Struktur, Behavior, Performance</i> (SSBP)	33
3.6.2	Strategi Peningkatan Minat Nelayan dalam Kepesertaan Asuransi dengan Analisis SWOT	35
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1	Kondisi Umum Wilayah.....	42
4.2	Kinerja Kelembagaan dalam Program BPAN	45
4.2.1	Situasi	45
4.2.2	Struktur	47
4.2.3	Perilaku	52
4.2.4	Kinerja	56
4.3	Strategi Meningkatkan Minat Nelayan dalam Kepesertaan Asuransi Secara Mandiri	61
4.3.1	SWOT Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	63
4.3.2	SWOT BPJS Ketenagakerjaan	75
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	87
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Definisi nelayan kecil	14
2. Informan kunci dalam penelitian	29
3. Tujuan dan metode analisis data	31
4. Matriks SWOT	37
5. Faktor Strategi Internal (IFAS)	38
6. Faktor Strategi Eksternal (EFAS)	39
7. Data Kecamatan, Kelurahan, dan kepadatan penduduk wilayah pesisir Kota Bandar Lampung	44
8. Sumber alokasi anggaran kegiatan BPAN	56
9. Data capaian program BPAN	57
10. Data anggota kelompok nelayan penerima BPAN di Kota Bandar Lampung	58
11. Data penerima klaim asuransi di Kota Bandar Lampung	60
12. Matriks SWOT DKP Kota Bandar Lampung	67
13. Matriks IFAS DKP Kota Bandar Lampung	69
14. Matriks EFAS DKP Kota Bandar Lampung	70
15. Matriks SWOT BPJS Ketenagakerjaan	80
16. Matriks IFAS BPJS Ketenagakerjaan	81
17. Matriks EFAS BPJS Ketenagakerjaan	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran penelitian	9
2. Peta lokasi penelitian	25
3. Diagram analisis data kualitatif.....	32
4. Tahapan analisis SWOT.....	35
5. Diagram Kuadran Strategi pada Analisa SWOT	40
6. Peta Kota Bandar Lampung	43
7. Data kelompok nelayan Kota Bandar Lampung	46
8. Bentuk manfaat yang diterima	50
9. Prosedur klaim manfaat asuransi	51
10. Skema pelaksanaan program BPAN.....	62
11. Diagram posisi strategi sudut pandang DKP Kota Bandar Lampung	72
12. Diagram posisi strategi sudut pandang BPJS Ketenagakerjaan.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Panduan pertanyaan kepada nelayan.....	96
2. Panduan pertanyaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	97
3. Panduan pertanyaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	99
4. Panduan pertanyaan BPJS Ketenagakerjaan.....	100
5. Pengelompokan Kategorisasi Data Hasil Wawancara	102
6. Transkrip, koding, dan kategorisasi data.....	103
7. Penyimpulan sementara	130
8. Dokumentasi pengumpulan data penelitian	131

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat nelayan merupakan suatu kelompok yang kehidupannya tergantung dari hasil laut dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan. Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan, yaitu dalam hal ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan sumber daya, peran geopolitik, dan peran dalam peningkatan devisa (Hikmah dan Nasution, 2017). Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam istilah nelayan, seperti apakah definisi nelayan tersebut mengacu pekerjaan, tempat tinggal, ataupun status pekerjaan (Prayogi dan Sari, 2019). Dalam pekerjaannya nelayan merupakan kegiatan turun temurun yang pada umumnya tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Perikanan tangkap skala kecil dapat diklasifikasikan ke dalam kondisi usaha dimana nelayan sebagai operator atau pelaksana usahanya, dengan kata lain operator usaha perikanan tangkap skala kecil diklasifikasikan sebagai nelayan kecil (Sembiring, 2012). Pernyataan ini merujuk pada daerah penelitian yang sebagian besar masyarakat nelayannya didominasi oleh nelayan kecil.

Istilah nelayan kecil saat ini belum mempunyai pengertian tunggal dalam kebijakan nasional. Regulasi yang diterbitkan pemerintah semakin mempertegas ketidakjelasan definisi nelayan kecil. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan (UU No. 45/2009) menyatakan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan ukuran kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gross Ton/ GT.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton/ GT. Nelayan kecil termasuk masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah, dan ini menjadi suatu pertanyaan yang mendasar kenapa mereka miskin atau apakah mereka menjadi nelayan karena miskin atau sebaliknya, sementara kondisi sumber daya laut yang melimpah menjadi salah satu masalah kemiskinan (Ahmadi, 2012). Ternyata banyak faktor yang menjadi permasalahan nelayan untuk menghambat kesejahteraan yang membuat mereka terperangkap di jurang kemiskinan. Menurut Adam (2016), permasalahan itu sangat identik dengan kondisi ketidakberdayaan mereka salah satunya adalah risiko ketidakpastian yang sangat besar khususnya pada perubahan lingkungan.

Pekerjaan sebagai nelayan dikenal dengan berbagai risiko yang tinggi antara lain berupa keselamatan di laut dan ketidakpastian hasil tangkapan. Kedua risiko ini berkaitan erat dengan kondisi perubahan iklim. Para nelayan rawan mengalami musibah saat mencari ikan di laut terutama saat musim cuaca buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian Rasyid dan Eriyanti (2020) yang mengatakan bahwa perubahan iklim membuat pekerjaan sebagai nelayan mempunyai risiko tinggi yang dapat mengancam nyawa dan masa depan keluarga nelayan dalam pekerjaannya.

Selain ancaman terhadap keselamatan jiwa, risiko kecelakaan kerja juga banyak terjadi adalah pada aktivitas pengoperasian alat tangkap. Beberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan antara lain *human error* sebesar 43.67 %, faktor alam, dan juga faktor teknis (Riantoro *et al.*, 2017). Peluang tingkat kecelakaan kerja dapat dihindari atau diminimalkan, namun diperlukannya kesadaran nelayan dalam menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Penelitian Rahmatunnazhifah *et al.* (2023) menyatakan bahwa adanya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman dan nyaman dalam mencapai suatu tujuan yaitu menghasilkan produktivitas yang maksimal. K3

sangat penting untuk dilaksanakan pada semua bidang pekerjaan dan perlu adanya kesadaran dalam penerapannya, yang mana masih sering diabaikan oleh para pekerja. Pekerja nelayan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup seringkali dihadapkan pada risiko tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan gelombang air laut yang tiba-tiba tidak bersahabat, serta kejadian-kejadian yang dapat merugikan lainnya yang berdampak pada hilangnya sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga (Agusman *et al.*, 2021).

Kondisi dari kecelakaan kerja ataupun keselamatan jiwa akibat potensi perubahan cuaca yang tidak dapat diduga bagi pekerjaan sebagai seorang nelayan, sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Menurut Murty (2020), hal ini tentu berdasarkan pada konsep kesejahteraan negara (*welfare state*) yang dicanangkan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan Hikmah dan Nasution (2018) yang mengungkapkan bahwa usaha penangkapan ikan memerlukan perlindungan keselamatan kerja karena sangat berisiko. Penerapan K3 nelayan juga dapat dilengkapi dengan sistem yang menunjang keselamatannya, seperti asuransi jiwa yang merupakan perlindungan terhadap keselamatan kerja dan risiko kematian.

Dukungan pemerintah terbentuk dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana pada pasal 86 menyebutkan pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam memenuhi kebutuhan pekerja nelayan, pemerintah juga melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya menjamin kegiatan nelayan dalam usaha penangkapan ikan merumuskan suatu Undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 yang disahkan pada tanggal 14 April 2016 dimana perlindungan untuk nelayan dalam hal ini berupa program asuransi (Febryano *et al.*, 2021). Dilihat dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi tiga. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian *juncto*

Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu: 1) Asuransi kerugian (*non life insurance*), yaitu perjanjian yang memberikan jasa dalam penanggulan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti; 2) Asuransi jiwa (*life insurance*), perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan; 3) Reasuransi (*reinsurance*), yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atas perusahaan asuransi jiwa.

Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) merupakan perwujudan dari tindak lanjut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Program asuransi nelayan ini merupakan salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kegiatan program BPAN merupakan bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan pemerintah kepada tertanggung (nelayan) dan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan, serta memberikan jaminan perlindungan untuk menghindari risiko dialami nelayan pada masa yang akan datang (Iman *et al.*, 2023). Program BPAN dirancang sebagai perlindungan bagi nelayan di dalam melakukan pekerjaannya serta memberikan stimulus dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi. Penelitian Adam (2016) mengemukakan bahwa asuransi nelayan merupakan faktor tidak langsung yang penting dalam mempengaruhi tingkat penerimaan nelayan, karena dengan asuransi nelayan, mereka menjadi lebih terjamin dalam mengendalikan biaya pengeluaran tidak terduga yang cukup besar bila terjadi musibah.

Bentuk perlindungan dalam kesehatan dan keselamatan kerja merupakan alternatif yang terbaik sebagai jaminan untuk nelayan, sehingga diharapkan

timbulnya kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi terhadap jaminan segala risiko kerja dan diharapkan kerugian atau kehilangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Iman *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa pentingnya menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap berasuransi, membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri. Permatasari *et al.* (2020) menyampaikan bahwa tujuan pemberian BPAN yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang, menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi, membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri, memberikan bantuan bagi ahli waris, dan memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi sehingga nelayan tidak merasa khawatir saat meninggalkan keluarga dalam mencari nafkah. Adapun sasaran BPAN meliputi nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan risiko yang dijamin yaitu kematian akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, dan santunan kematian alami.

Asuransi nelayan juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah dengan memberikan hak-hak perlindungan bagi nelayan. Manfaat perlindungan ini diberikan selama satu tahun pertama, dengan harapan tumbuhnya kesadaran nelayan untuk dapat melanjutkan kepesertaannya secara mandiri pada tahun berikutnya. Manfaat yang diperoleh antara lain ketentraman dan kenyamanan bagi nelayan, dan tujuannya dapat meningkatkan kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri (Agusman *et al.*, 2021). Program ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat nelayan itu sendiri.

Fenomena yang ditemukan dalam kehidupan nelayan bahwa keberlanjutan kepesertaan asuransi nelayan yang dibayarkan secara mandiri masih rendah. Penelitian Rona (2020) mengemukakan bahwa data nelayan BPAN dengan penyedia layanan asuransi PT Jasindo hanya 28% nelayan yang melanjutkan kepesertaan asuransinya secara mandiri. Kenyataannya sangat miris ketika program asuransi nelayan dirancang sebagai upaya pemerintah belum berjalan sesuai harapan. Upaya pemerintah dalam memenuhi hak nelayan untuk

mendapatkan perlindungan dan jaminan atas jiwa mereka dan akan membantu nelayan maupun keluarganya untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja tidak memberikan kesadaran pada nelayan untuk melanjutkan kepesertaan asuransi secara mandiri pada tahun berikutnya. Iman *et al.* (2023) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa adanya program bantuan premi asuransi nelayan tidak direspon baik oleh masyarakat, masih banyak masyarakat yang memberikan respon negatif terhadap program tersebut. Program asuransi dianggap hanya biasa digunakan ketika mereka tertimpa musibah yang berakibat kematian saja dimana hal tersebut tentu tidak ingin dialami oleh masing-masing anggota kelompok.

Peralihan pelaksanaan program BPAN terhadap penyedia layanan asuransi BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi perlindungan dan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya peralihan ini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem asuransi yang lebih terintegrasi dan efisien, yang mampu memberikan jaminan dan layanan yang lebih baik kepada para nelayan. Transisi tersebut ternyata tidak membawa pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan operator layanan asuransi sebelumnya. Rendahnya partisipasi atau keikutsertaan nelayan dalam keberlanjutan kepesertaan secara mandiri mencerminkan tidak semua nelayan yang memperoleh asuransi jaminan keselamatan kerja memahami secara mendalam tentang program BPAN.

Pada kenyataannya jika terjadinya kecelakaan kerja nelayan langsung berperan aktif dalam mencari informasi bagaimana kepengurusan klaim asuransi dan apabila masih terdaftar secara aktif maka tidak dipersulit dalam prosedur kepengurusan klaim asuransi. Fenomena permasalahan kesadaran dan keinginan nelayan dalam kepesertaan asuransi nelayan juga terjadi pada nelayan di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai strategi pengelolaan program BPAN terhadap kelembagaan program asuransi dan peningkatan minat nelayan dalam kepesertaan asuransi secara mandiri. Hal ini sebagai upaya mendukung keberhasilan suatu kebijakan program dalam perlindungan masyarakat nelayan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja kelembagaan dalam program BPAN di Kota Bandar Lampung;
2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan minat nelayan dalam kepesertaan asuransi secara mandiri di Kota Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja kelembagaan dalam program BPAN di Kota Bandar Lampung;
2. Merumuskan strategi untuk meningkatkan minat nelayan dalam kepesertaan asuransi secara mandiri di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

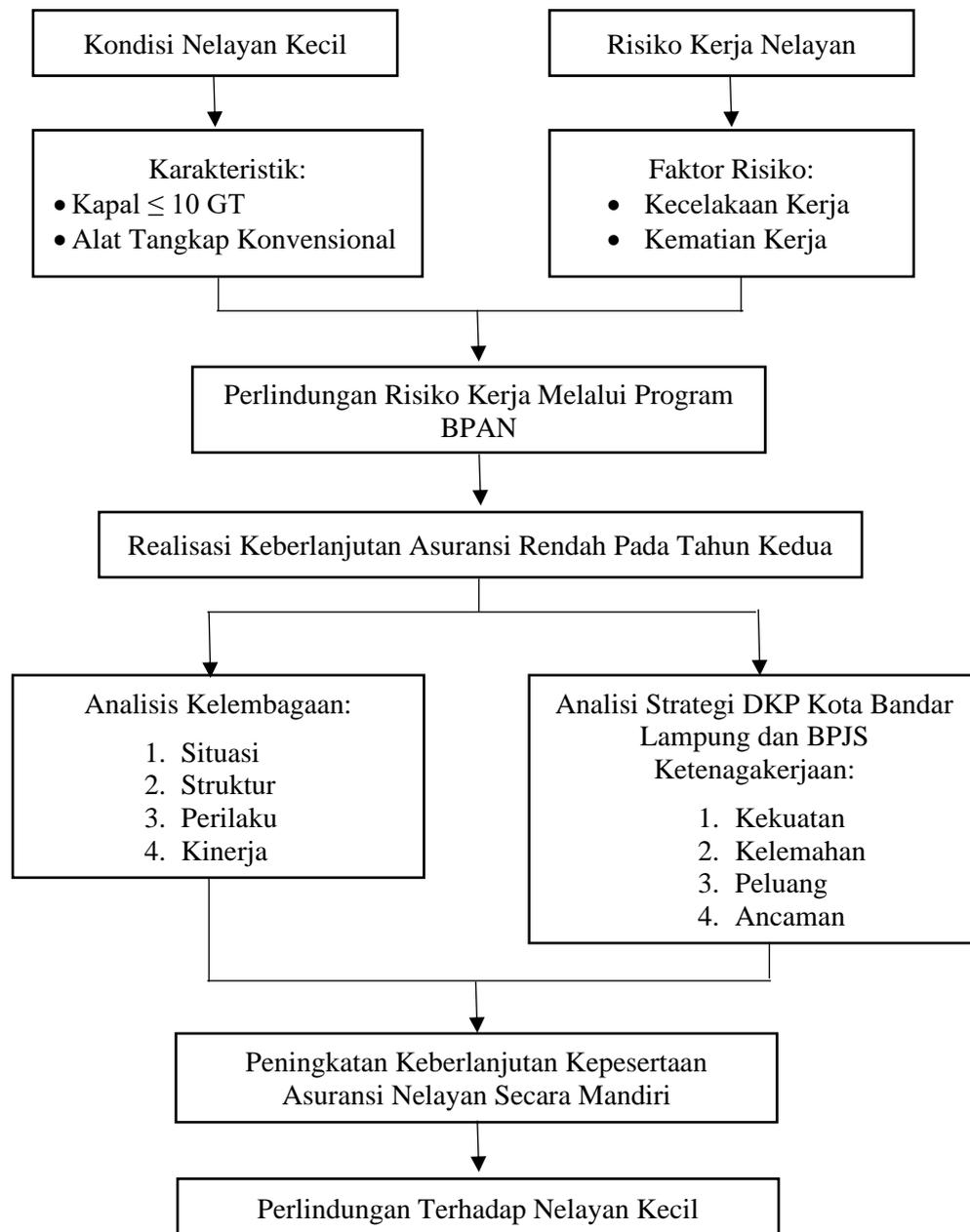
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian sejenis terkait pengelolaan asuransi nelayan;
2. Manfaat bagi *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan perusahaan) sebagai informasi dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan program asuransi nelayan;
3. Manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan keilmuannya serta sebagai pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar Magister pada program studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut (MWPL) Universitas Lampung.

1.5 Kerangka Pikir

Nelayan kecil pada dasarnya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan ukuran kapal berukuran paling besar 10 GT dan alat tangkap yang konvensional, memiliki kewaspadaan tinggi terhadap risiko kerja yang dapat mengancam keselamatan jiwa seperti perubahan iklim atau cuaca buruk yang sulit diprediksi. Pemerintah dalam hal ini hadir dengan membuat suatu kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bentuk perlindungan pekerja nelayan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Akan tetapi dalam realisasinya, bentuk partisipasi nelayan dalam keberlanjutan kepesertaan asuransi nelayan secara mandiri masih sangat rendah.

Dengan demikian, perlu untuk mengkaji kinerja kelembagaan dalam program BPAN guna memahami aturan dan mekanisme dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat dianalisis strategi yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberlanjutan minat nelayan dalam kepesertaan asuransi secara mandiri. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam implementasi program BPAN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir berikut ini:



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelembagaan

Kelembagaan menurut Suharti *et al.* (2016) didefinisikan sebagai aturan dan rambu-rambu sebagai panduan untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain dalam suatu kelompok masyarakat. Aturan tersebut merupakan panduan yang dipakai oleh para anggota dalam suatu kelompok untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling ketergantungan. Sementara Schmid (2004) menjelaskan bahwa kelembagaan merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara orang dan mendefinisikan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta hak-hak istimewa anggotanya. Aturan dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan setiap orang atau organisasi mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Secara definitif, kelembagaan diartikan sebagai suatu gagasan aturan (*rule of conduct*) formal (seperti hukum, sistem politik, pasar dan sebagainya) serta informal (seperti norma, tradisi, sistem, nilai, agama, tren sosial dan lain sebagainya (Nasution *et al.*, 2020). Kelembagaan merefleksikan sistem nilai dan norma dalam masyarakat, tetapi nilai dan norma itu bukanlah kelembagaan itu sendiri (Nasution *et al.*, 2024).

North (1990) lebih menekankan kelembagaan sebagai aturan main di dalam suatu kelompok yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Kelembagaan merupakan faktor penting yang menjadi variabel pendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara karena posisi kelembagaan yang mampu berjalan diatas realitas sosial. Penataan institusi (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur-unsur aturan operasional untuk mengatur

pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Dari definisi para ahli tersebut dapat didefinisikan bahwa kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Efektivitas kelembagaan ditentukan oleh efektivitas interaksi sosial yang terjadi yang mencakup partisipasi dalam proses pembuatan peraturan sehingga menimbulkan rasa memiliki peraturan tersebut serta komunikasi, informasi, interpretasi dan pemaknaan isi peraturan berlangsung yang melibatkan pengetahuan dan pengalaman maupun jaringan kekuasaan (*web of power*) yang telah ada di masyarakat (Ribot dan Peluso, 2003).

Kegiatan kelembagaan tidak dapat dilihat pengaruhnya dari segi internal kelembagaan saja, tetapi juga dilihat dari segi eksternal kelembagaan (Kusnandar *et al.*, 2013). Menurut Hanafie (2010), salah satu syarat suatu pembangunan pedesaan dikategorikan maju adalah dilihat dari aspek kelembagaannya. Hal ini senada dengan penjelasan Febryano *et al.* (2015) bahwa kelembagaan lokal mampu membantu pemerintah dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Menurut pandangan ahli kelembagaan rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Teori kelembagaan seringkali digunakan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksi dampak dari aturan main serta membahas bagaimana perubahan suatu aturan dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan. Pola kelembagaan yang dikembangkan dalam penelitian ini berlandaskan pada kerangka kerja *institutional-impact* yang diadopsi dari Schmid (2004). Tiga poin elemen utama yang mengacu yaitu situasi, struktur dan kinerja kelembagaan. Scott (2008) juga menambahkan bahwa kelembagaan merupakan hasil interaksi dan perpaduan dari tiga elemen yang berkaitan dengan pengaturan, norma-norma dan kultural-kognitif, yang secara bersamaan berbau di antara kegiatan atau aktivitas dan sumberdaya, yang memberikan kestabilan dan makna terhadap kehidupan sosial.

Selain tiga elemen utama tersebut, Nugroho (2016) juga menambahkan dalam mengatasi permasalahan sering kali orientasi solusinya menekankan pada aspek teknis pelaksanaan program semata, padahal di dalamnya terlibat aktor-aktor yang motif, kepentingan, dan perilakunya sangat beragam. Bentuk perilaku dalam keberagaman motif, kepentingan, dan perilaku aktor memerlukan penataan aturan main baik berupa peraturan/perundang-undangan dan kebijakan, maupun dalam bentuk norma-norma, larangan-larangan, dan kontrak untuk mengendalikan perilaku para aktor baik secara individu, kelompok, dan organisasi agar tidak saling merugikan. Ichsan (2017) menyatakan bahwa dalam menganalisis pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan cara:

1. melakukan identifikasi pemangku kepentingan;
2. mengelompokkan dan membedakan antar pemangku kepentingan; dan
3. menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan merupakan proses yang dilakukan secara berulang, hingga ditetapkan pemangku kepentingan yang benar-benar mengetahui permasalahan.

Dalam sektor perikanan, kelembagaan merupakan salah satu rekomendasi yang dianggap tepat dalam pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui penguatan kelembagaan karena posisi kelembagaan sebagai salah satu subsistem agribisnis turut memberikan hubungan yang signifikan terhadap keragaan sistemnya. Menurut Saiful (2022), Kelembagaan sosial pada masyarakat nelayan akan muncul dari kehidupan bersama dan merupakan suatu

proses yang tidak direncanakan secara sistematis tetapi tumbuh secara alami. Pada awalnya masyarakat nelayan mencari cara yang dapat digunakan sebagai wadah memenuhi kehidupan mereka, kemudian mereka menemukan beberapa pola yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan proses selanjutnya diperkuat kebiasaan yang dilakukan.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan saat ini salah satunya yaitu peran dan fungsi kelembagaan nelayan sebagai wadah organisasi belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang ada diperlukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan dengan aturan yang mengikat untuk mengatasi permasalahan dalam kelembagaan perikanan. Hindriks (2019) mengatakan bahwa lembaga mempunyai fungsi membantu masyarakat menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan, perangkat kelembagaan yang digunakan dalam masyarakat dapat berbeda untuk mengatur perilaku orang-orang yang terlibat yang memerlukan koordinasi dan kerja sama ekstensif.

2.2 Nelayan Kecil

Salah satu mata pencaharian (*livelihood*) yang pada umumnya di wilayah pesisir adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Undang-undang No 31 Tahun 2004). Sedangkan menurut (Mulyadi, 2007) nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Berikut merupakan penggolongan nelayan berdasarkan segi sosialnya menurut Suyanto (2013), yaitu:

- a. Penguasaan alat produksi/peralatan tangkap (perahu, jaring, serta perlengkapan lainnya): strukturnya dikategorikan sebagai pemilik (mempunyai alat produksi) serta buruh (tidak memiliki alat produksi, kegiatan produksi pada sebuah unit perahu, dan hanya menyumbangkan tenaganya dengan memperoleh hak terbatas);
- b. Skala investasi modal usaha: strukturnya yaitu nelayan besar (investasi modal relatif banyak) dan nelayan kecil;

- c. Tingkat teknologi peralatan tangkap ikan: strukturnya terbagi menjadi nelayan modern (teknologi penangkapannya canggih) dan nelayan tradisional.

Istilah nelayan kecil dibutuhkan guna merepresentasikan standar pelaku perikanan yang paling sederhana. Standar itu diperlukan agar pemerintah mampu mensejahterakan masyarakat. Nelayan dalam subyek perikanan skala kecil dianggap penting karena berperan meningkatkan ketersediaan gizi makanan dari ikan untuk pasar lokal, nasional, dan internasional (Pramonda dan Apriliani, 2019). Perikanan skala kecil menyumbang sekitar separuh ikan global di negara berkembang (FAO, 2015). Memberdayakan nelayan kecil harus direalisasikan melalui pedoman kebijakan publik yang tepat.

Menurut Mulyadi (2007) sesungguhnya, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan terbagi atas tiga yaitu:

- a. Nelayan Buruh, Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain;
- b. Nelayan Juragan, Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang digunakan oleh orang lain;
- c. Nelayan Perorangan, Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Rumusan tata bahasa definisi nelayan kecil yang tercantum pada UU No. 45/2009 dan UU No. 7/2016, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Definisi nelayan kecil

Regulasi	Pasal	Definisi
UU No. 45/2009	1 butir 11	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)
UU No. 07/ 2016	1 butir 4	Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa menurut UU No. 45/2009 dan UU No. 7/2016 terdapat perbedaan signifikan dalam besaran volume kapal serta aktivitas penggunaan kapal yang masih termasuk dalam pengertian nelayan kecil. Dalam kehidupan nelayan banyak ditemukan masalah, salah satunya permasalahan dalam sosial budaya kehidupan nelayan antara lain:

- a. rendahnya tingkat pendidikan,
- b. miskin pengetahuan dan teknologi penunjang pekerjaannya,
- c. kurang tersedianya wadah pekerjaan informal;
- d. kurangnya daya kreativitas,
- e. belum adanya perlindungan nelayan dari jeratan para tengkulak (Pramonda dan Apriliani, 2019).

BAPPENAS (2017), menyebutkan: “skala usaha nelayan kecil masih belum efisien serta memiliki produktivitas usaha yang rendah”. Para nelayan kecil melakukan kegiatan melaut yang umumnya merupakan kegiatan turun-temurun. Para nelayan tradisional melakukan kegiatan utama sebagai nelayan umumnya disebabkan kegiatan utama orang tua mereka adalah sebagai nelayan (Velentina, 2018). Pembahasan tentang nelayan, khususnya nelayan kecil atau tradisional sangat juga terkait dengan sistem kerja mereka. Pada umumnya jam kerja mereka relatif singkat biasanya cukup satu hari saja (*one day fishing*). Kondisi atau kebiasaan semacam ini berdampak pada hasil tangkapan yang tidak optimal sehingga mengakibatkan tingkat produksi rendah dan pendapatan mereka juga tidak optimal akibatnya tingkat kesejahteraan nelayan pun rendah (Damayanti, 2018).

Berdasarkan kepemilikan alat produksi, nelayan kecil umumnya terbagi menjadi dua. Pertama, nelayan pemilik alat produksi. Kedua, nelayan yang bertugas sebagai nelayan buruh. Nelayan pemilik alat produksi biasanya disebut sebagai nelayan juragan. Alat produksi dimaksud dapat berupa perahu, mesin perahu maupun alat penangkapan ikan. Nelayan juragan biasanya mempekerjakan atau merekrut nelayan lain dalam melakukan penangkapan ikan. Namun, ada juga nelayan pemilik perahu yang melakukan kegiatan menangkap ikan seorang diri menggunakan perahu miliknya. Kedua, nelayan yang bertugas sebagai nelayan

buruh. Nelayan buruh, atau yang biasanya disebut merupakan nelayan dengan yang pandega, memiliki kemampuan menangkap ikan namun tidak memiliki alat produksi. Tanpa alat produksi, tidak mungkin nelayan buruh melakukan kegiatan penangkapan ikan. Itulah sebabnya para nelayan buruh menjual tenaga dan keahlian melaut mereka kepada nelayan juragan (Velentina, 2018).

2.3 Risiko

Risiko kerja merupakan suatu kondisi yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas. Risiko sering kali digambarkan dengan suatu peristiwa, perubahan keadaan, konsekuensinya, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian tujuan (Tavares *et al.*, 2023). Menurut Nasution *et al.* (2024) manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengelola risiko yang ada dalam setiap kegiatan. Pengertian risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Pontensi kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko yang bersumber dari berbagai aktivitas.

Fauzi (2016) mengatakan ada beberapa definisi risiko sebagaimana dapat dilihat berikut ini:

1. *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kesempatan dari kerugian). *Chance of loss* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana terdapat suatu kemungkinan terjadinya kerugian. Umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana terdapat paparan atau potensi kerugian yang dapat terjadi. Sebaliknya jika disesuaikan dengan istilah yang dipakai dalam analisis data untuk mengukur seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa, maka “*chance*” sering dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas atau kemungkinan akan munculnya situasi tertentu.
2. *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian) Istilah “*possibility*” berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antar nol dan satu. Definisi ini barangkali sangat mendekati dengan pengertian risiko

yang dipakai sehari-hari. Akan tetapi definisi ini agak longgar, tidak cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.

3. *Risk is Uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian). Tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko ber hubungan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yaitu adanya risiko, karena adanya ketidak pastian.

Berdasarkan latar belakang di atas, Latif *et al.* (2020) mengatakan bahwa masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Hal ini berkaitan dengan faktor alam dan lamanya waktu melaut, namun kecelakaan kerja nelayan masih terjadi yang disebabkan oleh faktor *human error* terkait dengan kelengkapan alat keselamatan di atas kapal. Sejalan dengan Vinezzia (2021) bahwa pekerjaan sebagai nelayan juga tak luput dari bahaya ataupun risiko kecelakaan di tempat kerja. Bahaya potensial memiliki arti sebagai sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Dalam kegiatan penangkapan ikan harus selalu mengutamakan keselamatan. Langkah-langkah keamanan yang tepat akan menyelamatkan nyawa, melindungi kapal dari kerusakan, menghindari kecelakaan dan cedera serius, menjaga lingkungan, dan membantu memastikan penangkapan ikan yang menguntungkan (FAO, 2021).

Manajemen Risiko adalah suatu upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu sistem yang baik, sehingga memungkinkan manajemen untuk meningkatkan hasil dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang ada (Nasution *et al.*, 2024). Dalam manajemennya diperlukan penanganan dalam penanggulangan risiko. Penanganan risiko adalah proses untuk memodifikasi risiko. Ada beberapa penanganan risiko diantaranya:

1. Menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko,
2. Mengambil atau meningkatkan risiko untuk mendapat peluang (lebih baik, lebih menguntungkan),
3. Menghilangkan sumber risiko,
4. Mengubah kemungkinan,
5. Mengubah konsekuensi,

6. Berbagi risiko dengan pihak lain (termasuk kontrak dan pembiayaan risiko),
7. Mempertahankan risiko dengan informasi pilihan.

Bhuana *et al.* (2017) mengatakan bahwa diperlukan pemantauan dan pengkajian ulang dilaksanakan terhadap seluruh proses manajemen risiko termasuk konteksnya (lingkungan, proses, organisasi, strategi, *stakeholder*). Manajemen risiko dalam pekerjaan sebagai nelayan terus menuntut secara fisik. Nelayan terkena getaran seluruh tubuh dan kondisi lingkungan yang ekstrim dapat berkontribusi pada lingkungan kerja yang tidak sehat, dan peningkatan risiko kesehatan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, pastilah terdapat suatu bahaya potensial yang ada di lingkungan kerja tersebut, maupun risiko dari pekerjaan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

Pekerja nelayan juga memiliki risiko terjadinya kecelakaan kerja dikarenakan profesi nelayan mempunyai karakteristik pekerjaan yang disebut 3D yaitu membahayakan (*dangerous*), kotor (*dirty*), dan sulit (*difficult*). Selain dari ketiga karakteristik tersebut ditambah lagi ukuran kapal para nelayan yang didominasi relatif kecil berlayar diatas gelombang laut yang besar dengan kondisi kapal penangkap ikan yang licin karena air hasil penangkapan serta keadaan cuaca tidak menentu setiap harinya memperbesar risiko kecelakaan kerja pada nelayan (Imron *et al.*, 2017).

Suwardjo *et al.* (2017) juga mengatakan bahwa penyebab kecelakaan pada kapal perikanan, yaitu rendahnya kesadaran awak kapal tentang keselamatan kerja pada pelayaran dan kegiatan penangkapan, rendahnya penguasaan kompetensi keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan, kapal tidak dilengkapi peralatan keselamatan sebagaimana seharusnya, cuaca buruk seperti gelombang besar dan menderita sakit keras dalam pelayaran. Oleh karena itu diperlukannya upaya yang serius dan konsisten agar risiko tersebut dapat diatasi, sehingga nelayan dapat melakukan aktivitas melalui pengelolaan suatu risiko atas keselamatan kerja.

2.4 Asuransi

Menurut Danarti (2011) Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Sementara dilihat dari jenisnya, asuransi dibedakan menjadi tiga. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yaitu:

1. Asuransi kerugian (*non life insurance*), yaitu perjanjian yang memberikan jasa dalam penanggulan risiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
2. Asuransi jiwa (*life insurance*), perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungansian risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan;
3. Reasuransi (*reinsurance*), yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungansian ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atas perusahaan asuransi jiwa.

Dari ketiga jenis asuransi tersebut, asuransi jiwa adalah salah satu asuransi yang penting bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, yaitu salah satu asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang terhadap kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan karena meninggalnya seseorang dalam hal ini nelayan yang bisa saja disebabkan oleh kecelakaan kerja.

Asuransi merupakan suatu cara dengan mana risiko dua atau lebih individu atau perusahaan digabungkan melalui kontribusi bersama yang dikumpulkan dalam suatu pendanaan, yang merupakan sumber bagi pembayaran klaim. Asuransi juga dilengkapi dengan kontrak hukum yang menyatakan bahwa penanggung berjanji akan membayar atau memberikan jasa-jasa tertentu apabila tertanggung menderita kerugian sebagaimana dijamin dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan kondisi perjanjian. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu kegiatan perlindungan finansial atau ganti rugi secara materi untuk jiwa, kesehatan dan lain sebagainya. Manfaatnya untuk mendapatkan

penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana pihak tertanggung melakukan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut (Junaidi, 2018).

Berdasarkan definisi dari KUHD dan Undang-undang No. 40 tahun 2014, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:

- a. Pihak peserta (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur
- b. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak peserta, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.
- c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu (yang tidak diketahui sebelumnya)
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, dimana BPJS Ketenagakerjaan ditujukan untuk menyelenggarakan program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh BPJS yaitu:

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- b. Memungut dan mengumpulkan premi dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. Menerima Bantuan iuran atau premi dari Pemerintah;
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, iuran atau premi asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Polis asuransi adalah perjanjian yang menjadi dasar perikatan antara perusahaan asuransi dengan tertanggung.

2.5 Asuransi Nelayan

Asuransi nelayan termasuk dalam asuransi jiwa dimana asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kerugian bagi nelayan ataupun keluarga jika terjadi suatu kecelakaan dalam bekerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, maka diharapkan bahwa tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan juga dinyatakan dalam Pasal 28H Ayat (1), bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menentukan bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang ini adalah (Rani, 2016):

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;

3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
4. Memperkuat kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
5. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
6. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
7. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas negara berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan dengan berbagai aspek perlindungan, baik secara ekonomi, keamanan, keselamatan, maupun secara kepastian hukum. Asuransi nelayan menjadi salah satu alternatif untuk menghadapi risiko nelayan dan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah program berkaitan dengan asuransi untuk nelayan, seperti program BPAN yang hanya dikhususkan bagi nelayan kecil yang memiliki kapal berkapasitas kurang dari 10 gross ton (GT) dan sudah mengantongi kartu KUSUKA dengan nilai manfaat per orang berupa santunan untuk kecelakaan dan kematian akibat aktivitas penangkapan ikan.

Program kementerian kelautan dan perikanan sudah dilakukan analisa bahwa sangat diperlukan perlindungan atas nelayan yang memiliki risiko pekerjaan yang tinggi maka Kementerian bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk pemberian bantuan premi asuransi bagi nelayan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari *et al.* (2022) bahwa adanya kebijakan asuransi nelayan ini dilihat dari permasalahan risiko pekerjaan nelayan sebagai pekerjaan yang sangat rawan terjadi kecelakaan dan banyak dari nelayan di Indonesia tidak mempunyai jaminan keselamatan jiwa didalam melakukan kegiatan di laut, maka output dari kebijakan ini adalah nelayan mendapatkan jaminan jiwa dengan mengikuti program asuransi nelayan dari pemerintah dan mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan, sedangkan outcome dari kebijakan ini nelayan merasa pekerjaannya untuk mencari ikan di laut cenderung

lebih aman karena keselamatan jiwa nelayan sudah diasuransikan bagi nelayan yang telah mengikuti program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari pemerintah.

BPAN merupakan salah satu program pemerintah yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016-2017 di Kota Bandar Lampung melalui lembaga penyedia asuransi PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) dengan produk asuransi yaitu Simantep. Dilanjutkan tahun 2020-2023 dengan lembaga penyedia asuransi yang berbeda yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan produk asuransi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Program BPAN yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu diberikan secara gratis dan hanya berlaku pada satu tahun berjalan untuk tiap nelayan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah stimulus yang diberikan untuk mendorong nelayan agar memiliki kesadaran dalam perlindungan diri. Setelah selesainya masa berlakunya asuransi, maka nelayan dihimbau oleh pemerintah untuk melanjutkan kepesertaan asuransi secara mandiri dengan penyedia pelayanan asuransi yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran bagi nelayan dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan secara mandiri sebagai jaminan keselamatan kerja.

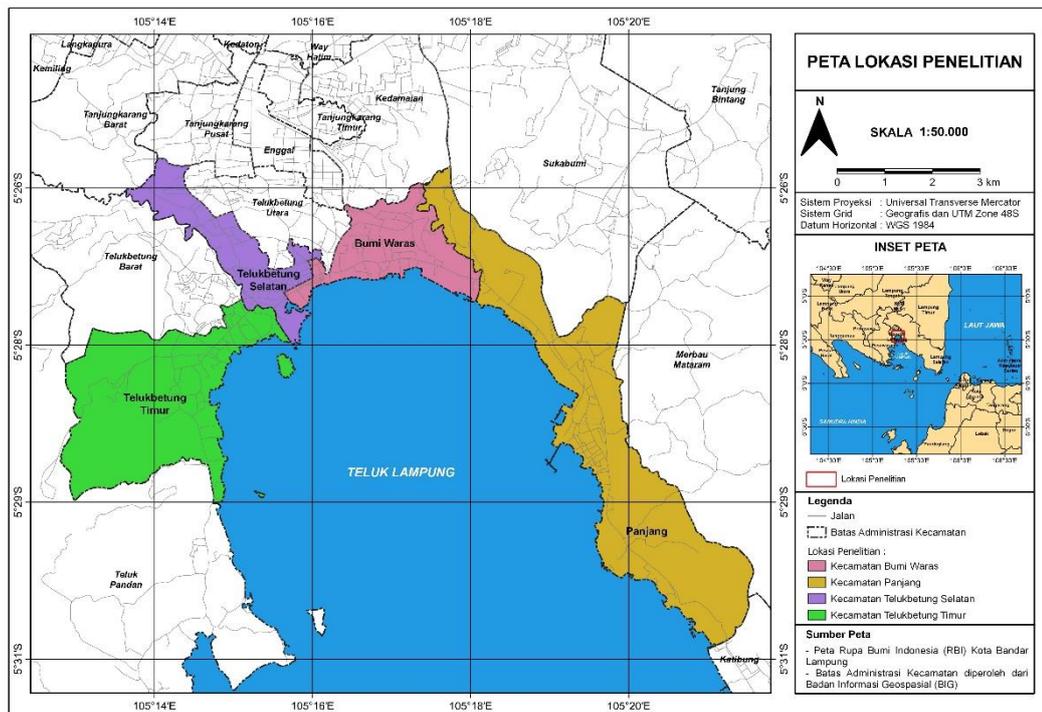
Dengan mempertimbangkan berbagai literatur dan tinjauan pustaka yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kinerja kelembagaan dalam program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada nelayan kecil dari berbagai risiko yang mengancam keberlanjutan usaha perikanan mereka. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada perumusan strategi yang efektif, holistik, dan berbasis bukti untuk meningkatkan partisipasi dan minat nelayan kecil terhadap keikutsertaan dalam program asuransi tersebut. Strategi yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi kendala yang ada, seperti kurangnya sosialisasi, pemahaman, dan akses terhadap produk asuransi, serta meningkatkan koordinasi dan transparansi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program BPAN. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam

pengembangan dan implementasi kebijakan asuransi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan nelayan kecil khususnya di Kota Bandar Lampung.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus s.d November 2024, di Kota Bandar Lampung yaitu pada Kecamatan yang berbatasan dengan Pesisir Teluk Lampung seperti Kecamatan Bumi Waras, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Timur. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta lokasi penelitian

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain alat tulis, laptop/ komputer, kuisisioner, kamera digital, dan alat perekam (*voice recorder*). Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian yaitu panduan pertanyaan wawancara mendalam terkait bagaimana pengelolaan program asuransi nelayan kepada informan kunci.

3.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif berproses secara induktif (*grounded*) untuk mengembangkan teori tentang fenomena yang menarik berdasarkan pada pengamatan. Peneliti disebut sebagai *Participan-Observation* karena dalam penelitian, peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data terhadap informan penelitian. Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah makna kebenaran menurut peneliti (Irawan, 2006). Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fakta-fakta dan memahami makna yang berada pada fakta-fakta tersebut. Hasil pengamatan pada penelitian kualitatif yaitu data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang berisi kata-kata tertulis atau lisan terhadap mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi. Pada akhirnya akan dikaji secara mendalam untuk menemukan pola yang muncul pada suatu peristiwa dan dapat ditarik suatu kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Yuliani, 2018).

Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus merupakan salah satu metode yang digunakan dalam bidang ilmu sosial, studi kasus juga merupakan strategi yang sesuai untuk penelitian yang berkenaan dengan *how* dan *why* (Nur'aini, 2020). Sesuai dengan teori Yin (2015) bahwa metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian 'bagaimana' dan 'mengapa' objek tersebut terjadi dan dapat dipandang sebagai suatu kasus, bukan sekedar menjawab penelitian tentang 'apa' terhadap objek yang diteliti. Fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

3.4 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling non probability* yang dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Irawan, 2006). *Purposive sampling* merupakan sebuah metode *sampling* dengan menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menanggapi kasus penelitian (Lenaini, 2021). Informan yang terpilih pada umumnya merupakan orang atau personal yang terlibat dalam kegiatan program asuransi nelayan.

Kumara (2018) mengatakan bahwa penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu suatu populasi yang disebut informan kunci. Pengambilan sampel secara sengaja ini sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi. Pemilihan sumber informan yang tepat merupakan unsur penting dalam keberhasilan penelitian. Akan tetapi, peneliti tidak dapat menggunakan statistik parametrik sebagai teknik analisis data, karena tidak memenuhi persyaratan random.

Penentuan karakteristik informan dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan. Menurut Irawan (2006) bahwa pertimbangan tertentu lebih kepada kemampuan informan mengenai variabel-variabel yang diteliti. Hal ini untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Pemilihan karakteristik informan yaitu subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan, subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian, dan subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi. Jumlah informan kunci yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang memiliki relevansi dengan program BPAN. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kriteria-kriteria pemilihan informan kunci adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat nelayan pesisir Kota Bandar Lampung yang mampu memberikan informasi yang cukup dalam pengetahuan dan pengalaman mengenai asuransi nelayan;
- b. Mempunyai peran dan terlibat dalam pengelolaan program asuransi nelayan;
- c. Mempunyai peran dan terlibat dalam pengelolaan premi asuransi nelayan;
- d. Mempunyai peran dan terlibat dalam komunitas nelayan;
- e. Mudah ditemui ataupun didekati oleh peneliti;
- f. Berpengaruh dalam komunitas tertentu untuk mewakili dan memahami pandangan banyak orang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Informasi yang dikumpulkan langsung melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat disebut data primer, sedangkan informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi merupakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara pengamatan terlibat, wawancara mendalam (*in depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut ini :

A. Pengamatan Terlibat

Metode pengamatan terlibat disebut *participatory observer*, yaitu kehadiran dilakukan dengan semua panca indera dalam berhadapan dengan objek penelitiannya. Pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dirangkai dalam sebuah kata dan kalimat ilmiah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengamatan langsung ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang sedang diamati sekaligus *crosscheck/* triangulasi atas data hasil wawancara mendalam sehingga dapat mengungkap dan mendeskripsikan secara utuh dan sistematis mengenai program asuransi nelayan di Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti ikut dalam pertemuan kelompok, pendataan produksi hasil penangkapan, dan berdiskusi dengan masyarakat. Selain itu, bersama DKP Kota Bandar Lampung melakukan pemantauan aktivitas masyarakat, berdiskusi dan ikut dalam mengidentifikasi nelayan calon peserta BPAN.

B. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan dengan mengikuti kegiatan nelayan untuk mendapatkan fakta tentang objek yang diteliti. Sependapat dengan Yin (2015) bahwa peneliti harus mempunyai kemampuan untuk menyadari realitas sudut pandang ‘orang dalam’ dalam melakukan wawancara untuk memperoleh data yang sebenarnya. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang telah disusun disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari informan dan pelaksanaan wawancara mengalir seperti percakapan sehari-hari. Teknik wawancara ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran mengenai aktivitas kelembagaan dalam program asuransi nelayan. Wawancara ini dilakukan secara mendalam kepada informan kunci (*key informan*). Sependapat dengan Wahyuni (2023) bahwa pada pendekatan analisis studi kasus cenderung memiliki sampel kecil untuk mencari kedalaman analisis. Pertimbangan dalam penentuan ukuran sampel adalah semakin kecil ukuran sampel, makin intens dan mendalam data yang dikumpulkan. Ukuran sampel yang lebih kecil juga untuk memenuhi homogenitas.

Wawancara dilakukan berdasarkan keterlibatan dan pemahaman informan tentang program asuransi nelayan di Kota Bandar Lampung. Adapun informan yang dilibatkan dalam melakukan wawancara mendalam terdapat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Informan kunci dalam penelitian

	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Nelayan: Bumi Waras Teluk Betung Selatan Teluk Betung Timur Panjang	2 orang 1 orang 2 orang 2 orang	Ketua atau pengurus KUB Ketua atau pengurus KUB Ketua atau pengurus KUB Ketua atau pengurus KUB dan RT
2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	1 orang	Ketua Tim Pokja Penangkapan Ikan dan Kenelayanan
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung	1 orang 1 orang	Kepala Bidang Tangkap Penyuluh Perikanan
4	BPJS Ketenagakerjaan	1 orang	AR (<i>Account Representative</i>)

Sumber: Data Olahan

C. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan rangkaian diskusi yang direncanakan dan dirancang untuk memperoleh persepsi mengenai bidang minat tertentu (Wahyuni, 2023). FGD bertujuan untuk memperdalam wawasan dan pemahaman untuk penyusunan strategi peningkatan minat nelayan dalam kepesertaan asuransi secara mandiri di Kota Bandar Lampung. Dalam FGD ini diharapkan dapat menggarisbawahi permasalahan utama, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal, serta menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi yang dapat dilakukan melalui analisis SWOT. Selanjutnya hasil analisis SWOT digunakan sebagai acuan untuk memformulasikan rencana kebijakan yang akan diusulkan.

FGD dilakukan dengan dipandu oleh moderator dengan narasumber dari Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan. Peserta terdiri dari informan kunci terlibat dalam pengelolaan asuransi nelayan di Kota Bandar Lampung. Penyampaian pertanyaan semi terstruktur dimana peserta bebas untuk berbicara dalam memberikan sudut pandang terkait keterlibatan dan pengalaman mereka untuk mendorong pengkayaan informasi dari seluruh peserta.

D. Studi Dokumentasi.

Pengumpulan data studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto atau dokumen elektronik (Irawan, 2006). Dengan adanya studi dokumentasi pada penelitian ini diharapkan setiap kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini dapat terdokumentasi dengan baik dan jelas sehingga dapat dijadikan rujukan bagi kegiatan penelitian lanjutan.

3.6 Metode Analisis Data

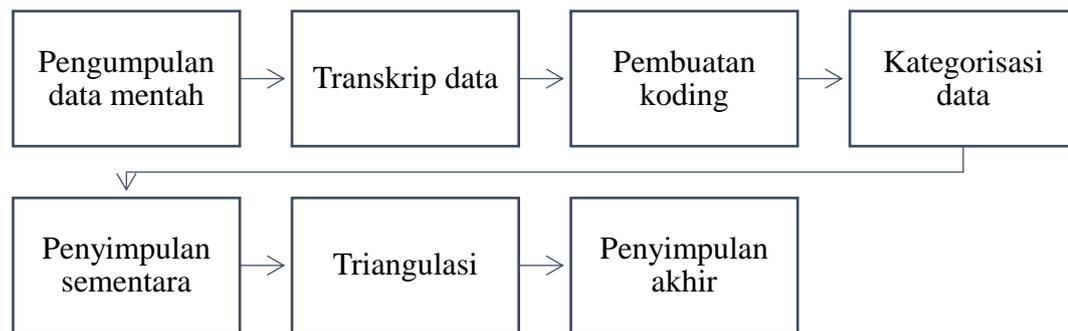
Dalam pengidentifikasian kinerja kelembagaan dan pengambilan strategi terhadap program ini menggunakan beberapa metode yang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Tujuan dan metode analisis data.

No.	Tujuan	Pengambilan Data	Informan Kunci	Analisis Data
1.	Menganalisis kinerja kelembagaan dalam program asuransi nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara mendalam - Pengamatan terlibat - Studi dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nelayan 2. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung 3. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung 4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 	SSBP (Schmid, 2004 dan Nugroho, 2016)
2.	Merumuskan strategi atau cara meningkatkan minat nelayan dalam kepesertaan asuransi secara mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - FGD - Wawancara mendalam - Pengamatan terlibat - Studi dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nelayan 2. DKP Provinsi Lampung 3. DKP Kota Bandar Lampung 4. BPJS Ketenagakerjaan 5. <i>Expert/ Akademisi</i> 	SWOT (Rangkuti, 2006)

Sumber: Data Olahan

Data yang didapat melalui hasil wawancara mendalam dan pengamatan di lapangan ditabulasi dan kemudian dianalisis secara deskriptif, sehingga melalui analisis ini akan menggambarkan bagaimana kelembagaan dalam pengelolaan asuransi nelayan dan bagaimana strategi dalam meningkatkan kepesertaan asuransi nelayan. Menurut Irawan (2006) analisis kualitatif bergantung pada data yang diperoleh dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi dengan proses penarikan kesimpulan yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Irawan, 2006

Gambar 3. Diagram analisis data kualitatif

Langkah-langkah dalam menentukan analisis data penelitian kualitatif adalah:

1. Pengumpulan Data Mentah

Data diambil melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka menggunakan tape recorder, kamera, dan alat mencatat. Pada tahap ini, peneliti hanya mencatat data apa adanya tanpa adanya campuran pemikiran, komentar, dan sikap peneliti.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini, catatan di lapangan diintegrasikan ke dalam bentuk tulisan dengan tetap mempertahankan keaslian data tanpa campuran pendapat dan pemikiran peneliti.

3. Pembuatan Koding

Setiap data yang telah ditranskrip, pada bagian tertentu dalam transkrip tersebut akan ditemukan hal-hal penting yang perlu dicatat untuk tahap analisis selanjutnya. Pencatatan ini dilakukan dengan mengambil kata kunci yang relevan dari pernyataan informan yang terkait dengan penelitian. Kata kunci ini kemudian akan diberikan kode tertentu.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, proses penyederhanaan data dilakukan dengan cara “mengikat” kata kunci yang dinamakan “kategori”. Dalam proses pengkodean dan pembentukan kategori, peneliti merupakan pihak yang paling memahami konteks penelitiannya.

5. Penyimpulan Sementara

Penyimpulan yang diambil harus didasarkan pada data yang tersedia. Jika

peneliti ingin memberikan penafsiran, maka interpretasi tersebut harus dicatat sebagai pikiran atau pendapat pada bagian akhir dari kesimpulan sementara ini.

6. Triangulasi

Triangulasi merupakan proses *check* dan *recheck* antara satu sumber data dan sumber lainnya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan dengan menyelaraskan berbagai sumber data dan teori. Harapannya dapat mengurangi bias dan memastikan bahwa hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya.

7. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan ini menandai tahap akhir dari penelitian. Kesimpulan akhir ditarik ketika peneliti mengidentifikasi bahwa data yang diperoleh telah mencapai titik jenuh (*saturated*), di mana data baru yang diperoleh hanya menghasilkan pengulangan informasi.

3.6.1 Kinerja Kelembagaan dalam Program BPAN dengan Analisis *Situation, Structure, Behavior, Performance* (SSBP)

Analisis data hasil wawancara mengenai kinerja kelembagaan dalam program BPAN di Kota Bandar Lampung akan dijelaskan dengan mengembangkan kerangka kerja berlandaskan pada teori dampak institusi yang diadopsi dari Schmid (1987;2004) dan Nugroho (2016), dimana dalam menganalisisnya menggunakan pendekatan SSBP yaitu situasi (*situation*), struktur (*structure*), perilaku (*behavior*) dan kinerja (*performance*). Teori ini mengacu pada pandangan situasi dan struktur dalam suatu sistem kelembagaan dapat saling mempengaruhi perilaku dan akhirnya perilaku mempengaruhi dan menentukan kinerja yang ditunjukkan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat efektivitas program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu menilai hasil yang dicapai, seperti jumlah klaim yang berhasil diproses, tingkat penyelesaian klaim, dan manfaat yang dirasakan oleh nelayan. Kinerja ini menunjukkan seberapa baik organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Salampessy *et al.* (2024) menyatakan bahwa SSBP dapat disusun ke dalam empat kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Situasi menggambarkan kondisi atau keadaan lingkungan di sekitar suatu organisasi yang mempengaruhi program BPAN. Situasi ini memberikan

gambaran konteks di mana kelembagaan beroperasi.;

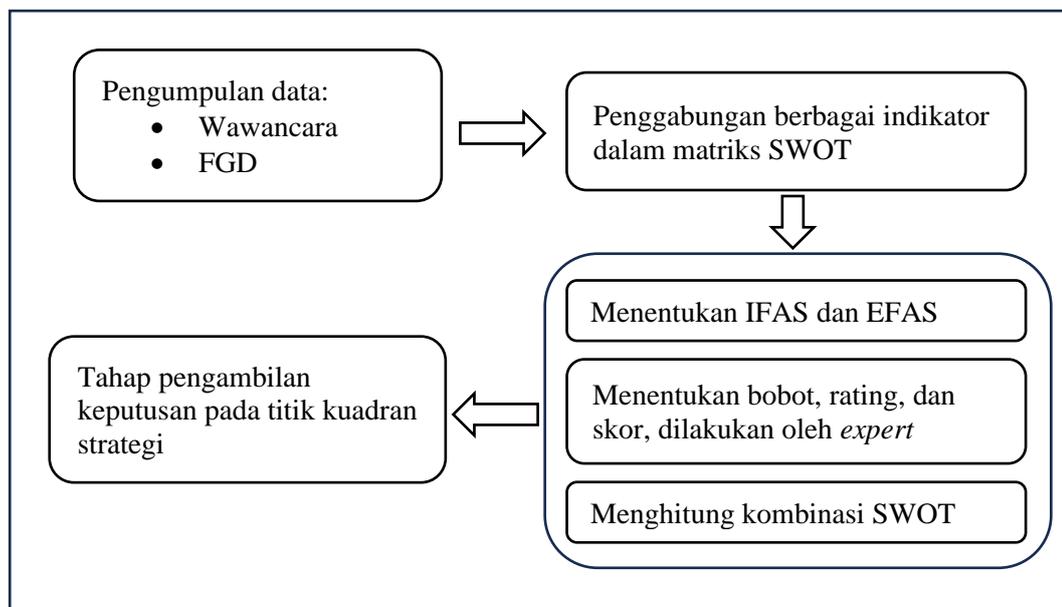
2. Struktur mendefinisikan aturan yang mengatur hubungan timbal balik antar aktor, dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan penyediaan sumber daya dalam aturan yang berlaku, pembagian tugas dalam tanggung jawab distribusi, serta hubungan antar bagian dalam organisasi. Pengertian struktur menurut (Schmid, 2004) menyebutkan bahwa struktur merupakan suatu alternatif-alternatif kelembagaan dimana para pemangku kepentingan dapat memilih untuk menyusun berbagai hal di dalam sebuah sistem;
3. Perilaku merupakan pola tindakan interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi. Pertunjukan menggambarkan siapa mendapat apa, keterkaitan sosial antar aktor dalam struktur kelembagaan, dan karakteristiknya;
4. Kinerja merupakan penilaian efektivitas kebijakan dengan membandingkan hasil yang diharapkan dan yang tercapai. Perilaku ini pada akhirnya mempengaruhi dan menentukan kinerja para pemangku kepentingan.

Model ini menggambarkan hubungan dan interaksi antara berbagai elemen dalam analisis kinerja kelembagaan, sehingga dapat digunakan untuk memahami dan mengelola permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Fokus utamanya adalah pada kebijakan dalam pengelolaan program asuransi nelayan, apakah struktur dan perilaku dapat mempengaruhi kelembagaan dalam pelaksanaan program asuransi nelayan sehingga dapat dievaluasi terkait kebijakan yang diberikan terhadap efisiensi, distribusi asuransi, transparansi, adaptif dan kolaboratif untuk memahami isu kebijakan utama dan proses perumusannya.

Dengan menganalisis aspek-aspek ini melalui pendekatan SSBP, [penilaian terhadap kinerja kelembagaan dalam program asuransi nelayan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi, struktur, perilaku, dan kinerja program. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, potensi peningkatan, serta upaya untuk meningkatkan efisiensi dan dampak positif program. Dengan demikian, analisis SSBP dapat menjadi landasan yang kuat dalam melakukan perbaikan dan pengembangan program asuransi nelayan untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung keberlanjutan kesejahteraan nelayan.

3.6.2 Strategi Peningkatan Minat Nelayan dalam Kepesertaan Asuransi dengan Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu metode analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal suatu organisasi. Dalam penelitian ini, terdapat sinergi antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan keberlanjutan program BPAN. Oleh karena itu, analisis SWOT dilakukan terhadap dua lembaga, yaitu DKP Kota Bandar Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan SWOT analisis dalam mencari strategi alternatif yang kompetitif untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada pada kedua lembaga. Tahapan Analisis SWOT dalam penelitian ini akan dibagi menjadi empat tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:



Sumber: Data Olahan

Gambar 4. Tahapan analisis SWOT

Tahapan dalam menganalisa SWOT adalah:

1. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan FGD terhadap seluruh informan.
2. Menentukan indikator analisis lingkungan internal dan eksternal dalam pelaksanaan program BPAN. Seluruh faktor dari lingkungan pemasaran internal dan eksternal yang sudah didapat kemudian di input dalam matriks IFAS dan matriks EFAS;

3. Merencanakan rangkaian alternatif strategi peningkatan minat nelayan terhadap kepesertaan mandiri yang sesuai dengan strategi DKP Kota Bandar Lampung maupun BPJS Ketenagakerjaan melalui penggabungan berbagai indikator dalam matriks SWOT;
4. Menganalisis data internal dan eksternal yang didapat dari hasil FGD kedalam matriks IFAS dan matriks EFAS. Hasil analisis yang diperoleh dari hasil pembobotan dan peratingan, kemudian ditarik garis vertikal serta horizontal hingga mendapat titik temu pada kuadran.

Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dalam menghadapi kompetitor, sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman untuk mengetahui adanya kesempatan atau peluang maupun ancaman di luar lingkungan perusahaan (Garnika *et.al.*, 2021). Instrumen yang digunakan dalam analisis SWOT meliputi:

1. Kekuatan (*Strengths*): Merupakan faktor internal yang merupakan keunggulan atau kompetensi unik dari organisasi atau perusahaan;
2. Kelemahan (*Weaknesses*): Merupakan kondisi internal yang melemahkan organisasi atau perusahaan, baik dalam hal sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, kepercayaan konsumen, maupun kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar;
3. Peluang (*Opportunities*): Merupakan kondisi eksternal yang menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan;
4. Ancaman (*Threats*): Merupakan kondisi eksternal yang mengancam kelancaran tujuan organisasi atau perusahaan.

Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman (Garnika *et.al.*, 2021). Analisis ini didasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*). Secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*), yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan antara kondisi internal yaitu: kekuatan dan kelemahan dengan kondisi eksternal yaitu peluang dan ancaman yang ada.

Faktor internal dan faktor eksternal kemudian diimplementasikan dalam matriks SWOT, untuk mendapatkan strategi terbaik (*the best strategy*). Menurut Rangkuti (2006), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan. Pada proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan visi, misi dan tujuan, kondisi sekarang, kondisi yang akan datang, strategi dan kebijakan.

Dengan demikian, analisis kebijakan dapat dilakukan melalui faktor-faktor strategis analisis SWOT. Penilaian ahli dari faktor internal-eksternal tersebut akan menghasilkan kelompok faktor-faktor: *strength*, *weakness*, *opportunity*, *threat*. Menurut Rangkuti (2006), setelah mengumpulkan informasi yang berpengaruh tahap selanjutnya adalah memanfaatkan informasi tersebut dalam perumusan strategi dengan matriks SWOT. Matriks ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis yang digambarkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Matriks SWOT

	IFAS	<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
EFAS	Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	Tentukan faktor-faktor kekuatan internal	Tentukan faktor-faktor kelemahan internal
<i>Opportunity (O)</i>	Strategi SO	Strategi SO	Strategi WO
Tentukan faktor-faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>Threats (T)</i>	Strategi ST	Strategi ST	Strategi WT
Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Sumber: Rangkuti (2006)

Setelah dilakukan penggabungan antara faktor internal dan eksternal dan telah melihat bobot dan rating dari masing-masing maka dilakukan penggabungan peluang dan ancaman dari tabel EFAS serta kekuatan dan kelemahan dari tabel IFAS kedalam kolom yang sesuai dalam matriks SWOT (Rangkuti, 2006). Namun tidak semua rencana strategi yang disusun dalam matriks SWOT ini dapat digunakan seluruhnya. Strategi yang dipilih adalah strategi yang dapat

memecahkan isu strategis suatu permasalahan. Penggabungan dari strategi yang meliputi kombinasi interaksi strategi internal-eksternal yang terdiri dari :

1. Strategi SO (*Strength-Opportunity*), ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi ST (*Strength-Threat*), ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*), ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menciptakan peluang.
4. Strategi WT (*Weakness-Threat*), ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Tahapan analisis SWOT sebagai formula atau perumusan strategis terhadap faktor strategi internal (IFAS), kemudian faktor strategi eksternal (EFAS) suatu program kebijakan. Faktor IFAS dan EFAS tersebut perlu diidentifikasi, disusun untuk membantu organisasi memahami posisi strategis yang tepat. Tabel IFAS dan EFAS dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Faktor Strategi Internal (IFAS)

1	2	3	4	5
Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
Kekuatan (S)				
1.				
2.				
3.dan seterusnya				
Jumlah Kekuatan (S)				
Kelemahan (W)				
1.				
2.				
3.dan seterusnya				
Jumlah Kelemahan (W)				
Total IFAS				

Tabel 6. Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

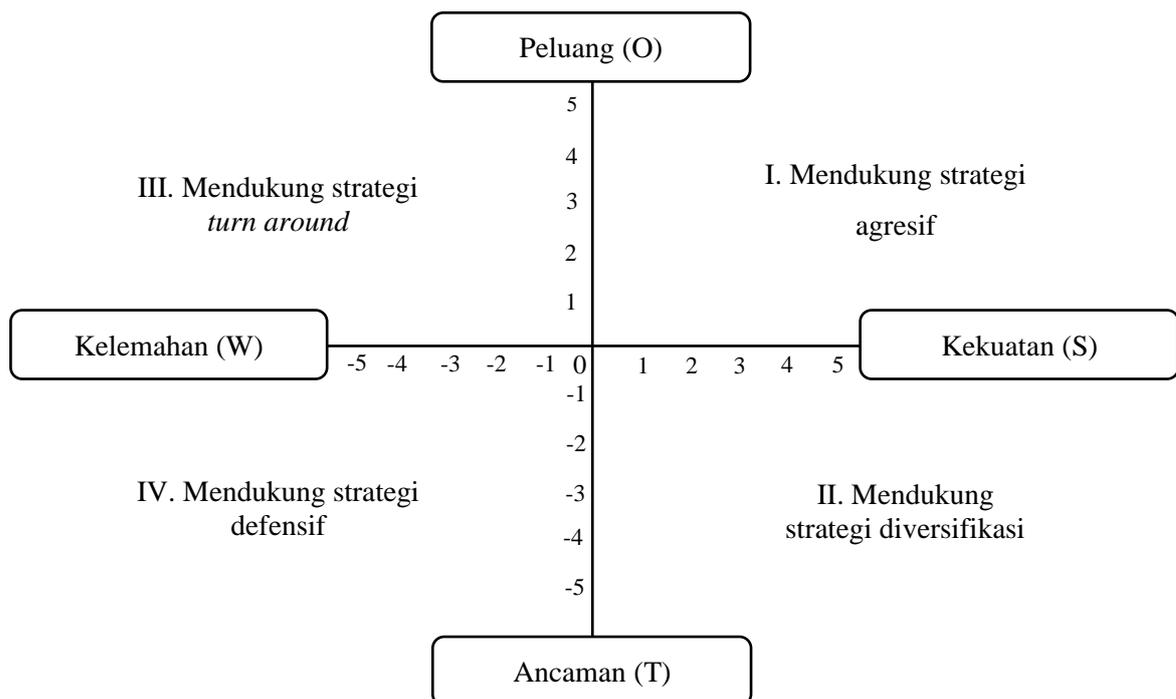
1	2	3	4	5
Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
Peluang (O)				
1.				
2.				
3. dan seterusnya				
Jumlah Peluang (O)				
Ancaman (T)				
1.				
2.				
3. dan seterusnya				
Jumlah Ancaman (T)				
Total EFAS				

Sumber: Rangkuti (2006)

Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor Strategi Internal (IFAS) dan Eksternal (EFAS):

- a. Menentukan faktor-faktor yang menjadi IFAS dan EFAS dari program asuransi nelayan pada kolom 1.
- b. Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis. (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00).
- c. Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*). Faktor variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik). Kemudian dibandingkan dengan rata-rata variabel yang bersifat negative. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
- d. Menggunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor. Nilai total ini, menunjukkan bagaimana kegiatan asuransi bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.

Dalam penelitian ini, penilaian bobot dan rating dalam analisis SWOT ditentukan oleh pakar kebijakan publik bertujuan untuk menjamin objektivitas dan ketepatan hasil. Pakar ini menggunakan keahlian mereka untuk mengidentifikasi dan menilai secara cermat faktor-faktor internal, seperti kekuatan dan kelemahan suatu lembaga, serta faktor eksternal, seperti peluang dan ancaman di lingkungan. Penentuan bobot berdasarkan signifikansi masing-masing faktor terhadap tujuan strategis, sedangkan rating diberikan berdasarkan kemampuan organisasi dalam mengelola atau memanfaatkan faktor tersebut. Harapannya hasil dapat mencerminkan gambaran yang akurat dan objektif untuk mendukung keputusan strategis yang lebih baik. Setelah dilakukan perbandingan antara faktor internal kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal peluang dan ancaman berdasarkan nilai yang dihasilkan untuk menentukan titik kuadran sebagaimana pada Gambar 5.



Sumber: Rangkuti (2006)

Gambar 5. Diagram kuadran strategi pada analisa SWOT

Keterangan:

- a. Kuadran 1: Merupakan situasi yang menguntungkan. Kebijakan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung

kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

- b. Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, kebijakan ini masih memiliki dari segi internal strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi.
- c. Kuadran 3: Kebijakan menghadapi peluang yang sangat, tetapi di lain pihak, dia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi kebijakan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.
- d. Kuadran 4: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, kebijakan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Secara keseluruhan, nilai sumbu X dan Y yang diperoleh berdasarkan analisis IFAS dan EFAS membantu dalam menetapkan strategi utama untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam menentukan langkah strategis yang perlu diambil oleh organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan jangka panjang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja kelembagaan dalam program BPAN tidak menunjukkan perubahan signifikan terhadap kepesertaan nelayan secara mandiri pada tahun kedua. Lemahnya regulasi yang tidak mengikat secara formal merupakan permasalahan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas program BPAN dalam menjangkau seluruh sasaran.
2. Strategi yang didapatkan berdasarkan analisis SWOT menunjukkan bahwa:
Strategi DKP Kota Bandar Lampung terhadap program, yaitu: merancang aturan keaktifan kepesertaan asuransi nelayan sebagai prasyarat terhadap pemberian bantuan lain, mencari dukungan sumber anggaran, menggerakkan komunitas kelompok nelayan, serta menjalin kolaborasi dengan KUD dan aktor lokal dalam pelayanan langsung. Sedangkan strategi BPJS Ketenagakerjaan terhadap program, yaitu: melakukan pendekatan proaktif melalui kolaborasi dengan KUD dan aktor lokal sebagai agen, sosialisasi intensif dan interaktif kepada komunitas nelayan, pelayanan dan evaluasi sesuai kebutuhan nelayan, dan merancang skema pembayaran yang lebih mudah diakses oleh nelayan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memiliki masukan terhadap strategi pengelolaan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kota Bandar Lampung, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perikanan Kota Bandar Lampung:
 - a. Perlu adanya evaluasi terhadap keberlanjutan kepesertaan nelayan secara mandiri;
 - b. Pemerintah selaku pemangku kebijakan perlu merancang kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa hal lain, seperti *punishment* dan kesepakatan yang wajib dipatuhi sehingga menjadi aturan yang mengikat nelayan.
 - c. Pemerintah sebaiknya mengelola dan mengembangkan sistem pendataan komprehensif mengenai kematian dan kecelakaan kerja nelayan binaan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
2. Bagi BPJS Ketenagakerjaan:
 - a. Dalam mempertahankan kepesertaan asuransi nelayan secara mandiri, perlunya evaluasi yang lebih terperinci dan spesifik terhadap karakteristik kebutuhan nelayan.
 - b. Dapat mengintegrasikan prasyarat penerapan K3 untuk memastikan bahwa nelayan yang memenuhi persyaratan keselamatan yang dapat mengajukan klaim. Hal ini bukan hanya meningkatkan keamanan bagi nelayan, tetapi juga mengurangi risiko finansial bagi perusahaan asuransi.
 - c. Diharapkan agar pihak perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi yang telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT. Penerapan strategi ini diharapkan dapat mempertahankan kepesertaan nelayan dalam program asuransi, serta memperkuat hubungan dengan komunitas nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. 2016. Telaah kebijakan perlindungan nelayan dan pembudidayaan ikan di Indonesia. *Jurnal Selat*. 20(2): 145–162. DOI: [10.22212/kajian.v20i2.575](https://doi.org/10.22212/kajian.v20i2.575).
- Agusman, Y., Asrun, L., Utomo, P. 2021. Implementasi program bantuan pemerintah asuransi nelayan BPAN di Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. *Journal Publicuho*. 4(4): 1139–1147. DOI: [10.35817/jpu.v4i4.21901](https://doi.org/10.35817/jpu.v4i4.21901).
- Ahmadi, R. 2012. Pemberdayaan masyarakat miskin: Pendekatan modal manusia. *Jurnal Administrasi Publik*. 10(2): 16–31. DOI: [https://DOI.org/10.30996/dia.v10i2.286](https://doi.org/10.30996/dia.v10i2.286).
- Asyaa, M.F., Agusta, I. 2021. Analisis partisipasi nelayan dalam program asuransi nelayan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 5(2): 294–311. DOI: [https://DOI.org/10.29244/jskpm.v5i2.710](https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.710).
- BAPPENAS. 2017. *Narasi Tunggal: Bantuan Premi Asuransi Nelayan*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/narasi-tunggal-bantuan-premi-asuransi-nelayan/>. Diakses pada: 03 Juni 2024.
- Bhuana, E.B., Sumartini, S., Sofia, A. 2017. Analisis manajemen risiko operasional dalam merencanakan strategi operasional (Studi kasus pada unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Cimahi). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*. 8(2): 1–7. DOI: [10.17509/JIMB.V8I2.12660](https://doi.org/10.17509/JIMB.V8I2.12660).
- BPS, 2023. *Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2023 - Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung*. BPS Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung (online:<https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/publication/2023/02/25/0890a0fd32082cf574db32af/kota-bandar-lampung-dalam-angka-2023.html>).

- Dahlan, N.K., Patitting, F., Lahae, K. 2020. Kesadaran hukum masyarakat dalam implementasi kebijakan asuransi nelayan di Kabupaten Bulukumba. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*. 12(2): 241–254. DOI: [10.18860/J-FSH.V12I2.10072](https://doi.org/10.18860/J-FSH.V12I2.10072).
- Damayanti, H.O. 2018. Strategi pengembangan usaha penangkapan ikan tradisional: Studi di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, *Jurnal Kebijakan Sosek KP*. 8(1): 13–26. DOI:[10.15578/jksekp.v8i1.6873](https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6873).
- Danarti, D. 2011. *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman & Nyaman*. 1st edn, G-Media. Yogyakarta. Indonesia.
- FAO. 2015. *Delivers On FAO's Strategic Objective 1 Help Eliminate Hunger, Food Insecurity And Malnutrition: Small Scale Fisheries Overall Goal*. (online: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f053cb5f-9795-4b37-bf71-981bc9f08bbd/content>).
- FAO. 2021. *Safety At Sea For Small-Scale Fishers*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fauzi, F. 2016. Manajemen resiko di tengah perubahan model bisnis telekomunikasi. *Jurnal Teknik Mesin*. 5(1): 32-36. DOI: [10.22441/jtm.v5i4.1222](https://doi.org/10.22441/jtm.v5i4.1222).
- Febryano, I.G., Suhardjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125–142. DOI: [10.20886/JAKK.2015.12.2](https://doi.org/10.20886/JAKK.2015.12.2).
- Febryano, I.G., Rona, M., Damai, A.A., Rochana, E., 2021. Fisherman attitude on fisherman insurance in Bandar Lampung City. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Biomass (ICSB 2019)*. 202: 119-124. DOI: [10.2991/aer.k.210603.020](https://doi.org/10.2991/aer.k.210603.020).
- Fitria, A., Puspandari, D.A. 2024. Analisis faktor yang mempengaruhi pelunasan tunggakan iuran peserta PBPU mandiri yang beralih segmen kepesertaan menjadi PBPU Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*. 13(2): 107-114.
- Garnika, E., Rohiyatun, B., Najwa, L. 2021. Implementasi analisis SWOT dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar. *Journal of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*. 4(2): 162–169. DOI: [10.31539/alignment.v4i2.3031](https://doi.org/10.31539/alignment.v4i2.3031).
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Andi. Yogyakarta.

- Hasanah, U., Asthauresia, P.P.V. 2019. Analisis program asuransi nelayan di Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah ACTON*. 15(2): 181-193.
- Hidayati, D., Abdurrahim, A.Y., Putri, I.A.P. 2019. *Policy Paper Penguatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk Perlindungan Petani dan Usaha Tani Padi yang Berkelanjutan*. Pusat Penelitian Kependudukan Kedepuitan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. DOI: [10.13140/RG.2.2.14237.26083](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14237.26083).
- Hikmah, H., Nasution, Z. 2018. Upaya perlindungan nelayan terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 7(2): 127-142. DOI: [10.15578/JKSEKP.V7I2.6464](https://doi.org/10.15578/JKSEKP.V7I2.6464).
- Hindrik, F. 2019. *Institutions And Fungsions. In Book: Institutions In Action: The Nature And The Role of Institutions In The Real*. University of Groningen. Groningen.
- Ichsan, A.C. 2017. *Kelembagaan Model Desa Konservasi di Taman Nasional Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat July 2017*. Institut Pertanian Bogor. Bogor, Indonesia.
- Ilmi, W.Z., Asbi, A.M., Syam, T. 2020. Identifikasi kapasitas penanggulangan pada kawasan informal Pesisir Kota Bandar Lampung dalam menghadapi dampak perubahan iklim. *Jurnal Pengembangan Kota*. 8(2): 177–187. DOI: [10.14710/jpk.8.2.177-187](https://doi.org/10.14710/jpk.8.2.177-187).
- Iman, N.I., Mahsyar, A., Parawu, H.E. 2023. Implementasi kebijakan premi asuransi nelayan di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*. 4(2): 233–243.
- Imron, M., Nurkayah, R., Purwangka, F. 2017. Pengetahuan dan keterampilan nelayan tentang keselamatan nelayan di PPP Muncar, Banyuwangi. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. 1(1): 99–109. DOI: [10.29244/CORE.1.1.99-109](https://doi.org/10.29244/CORE.1.1.99-109).
- Irawan, P. 2006. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Junaidi, A. 2018. Akad-akad di dalam asuransi syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*. 1(1): 11-23. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>.
- Juraemi. 2004. Hubungan antara kinerja kelembagaan dan keragaan sistem agribisnis pada perusahaan inti rakyat perkebunan kelapa sawit. *EPP*. 1(2): 33-40.

- Kusnandar, Padmaningrum D., Rahayu, W., Wibowo, A. 2013. Rancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik dalam mendukung ketahanan pangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*. 14(1): 92-101. DOI:[10.23917/jep.v14i1.163](https://doi.org/10.23917/jep.v14i1.163).
- Latif, I., Yulyanti, D., Rudiansyah. 2020. Faktor risiko kecelakaan kerja nelayan. *Jurnal Kesehatan Indra Husada*. 1(8): 43–56. <https://doi.org/10.36973/jkih.v8i1.221>.
- Lenaini, I. 2021. Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Jurnal Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 6(1): 33–39. DOI: [10.31764/historis.vXiY.4075](https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075).
- Mulyadi, S., 2007. *Ekonomi Kelautan*. 1st edn, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Indonesia
- Murty, T. 2020. Pelaksanaan perjanjian asuransi nelayan. *Simbur Cahaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 27(2): 158–176. DOI: [10.28946/sc.v27i2.1043](https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1043).
- Nasution, A., Hanter, H., Rahman, P. 2020. Peran kelembagaan dalam sistem pemasaran cabai merah di Sumatera Utara. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*. 5(5): 176-185. DOI: [10.37149/jia.v5i5.14225](https://doi.org/10.37149/jia.v5i5.14225).
- Nasution, P.K., Hasibuan, A., Aulia, S., Dewi, V.P. 2024. Analisis potensi bahaya lingkungan kerja pada nelayan pesisir tradisional. *JPM MOCCI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan* 2(1): 74–81. DOI: [10.61492/JPMOCCI.V2I1.105](https://doi.org/10.61492/JPMOCCI.V2I1.105).
- North, D.C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Nugroho, B. 2016. Kelembagaan, karakteristik sumberdaya, dan perilaku aktor: analisis kritis kebijakan pengelolaan hutan indonesia. Dalam: tata kelola sumber daya alam untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. *Kumpulan Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Pertanian Bogor*. IPB Press. Bogor, Indonesia.
- Nur'aini, R.D. 2020. Penerapan metode studi kasus yin dalam penelitian arsitektur dan perilaku. *INERSIA: Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur*. 16(1): 92-104. DOI: [10.21831/inersia.v16i1.31319](https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319).
- Nurallyanda, G., Anna, Z., Rizal, A., Suryana, A.A. . 2022. Analisis sosial ekonomi asuransi kecelakaan kerja nelayan tradisional di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. *Journal of Economic Perspectives*. 12(1): 66–77. DOI: <http://dx.doi.org/10.33512/jpk.v12i1.14745>.

- Octavany, M., Harahap, R.H., Ginting, B. 2023. Implementasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya (simantep) di Kota Sibolga. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*. 2(1): 36-46.
- Palinkas, L.A., Horwitz, S.M., Green, C.A., Wisdom, J.P., Duan, N., Hoagwood, K. 2015. Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and policy in mental health, Adm Policy Ment Health*. 42(5): 533–544. DOI: [10.1007/S10488-013-0528-Y](https://doi.org/10.1007/S10488-013-0528-Y).
- Permatasari, L., Suharso, P., Hartanto, W. 2020. Implementasi program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) pada masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*. 14(1): 225-231. DOI: [10.19184/jpe.v14i1.12056](https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12056).
- Pramoda, R., Apriliani, T. 2019. Kajian hukum kebijakan ukuran kapal dalam definisi nelayan kecil. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 9(2): 143–157. DOI: [10.15578/jksekp.v9i2.7499](https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7499).
- Prayogi, A.P., Sari, N.K.J.P. 2019. Pengembangan daerah Pesisir dengan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kawasan Pesisir Kabupaten Badung. *Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia*. 3(1): 17-28. DOI: [10.37484/jmph.030103](https://doi.org/10.37484/jmph.030103).
- Putro, G., Barida, I. 2017. Manajemen peningkatan kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional pada kelompok nelayan non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. 27(1):17-24. DOI: [10.22435/mpk.v27i1.5755.17-24](https://doi.org/10.22435/mpk.v27i1.5755.17-24).
- Rahmatunnazhifah, Andi, S., Sulolipu, A.M. 2023. Hubungan perilaku K3 dengan kecelakaan kerja pada pekerja pengelasan di PT. IKI Makassar. *Window of Public Health Journal*. 4(5): 861–870. DOI: [10.33096/WOPH.V4I5.858](https://doi.org/10.33096/WOPH.V4I5.858).
- Rangkuti, F., 2006. *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Rani, M. 2016. Insurance protection for fisherman. *Jurnal Selat*. 4(1):1-14.
- Rasyid, F.A., Eriyanti, F. 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi nelayan dalam program asuransi nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*. 2(1): 51–56. DOI: [10.24036/JMIAP.V2I1.109](https://doi.org/10.24036/JMIAP.V2I1.109).
- Riantoro, M.R., Hascaryo, I.B., Purwangka, F. 2017. Potensi kecelakaan kerja pada perikanan bagan apung di PPN Palabuhanratu, Jawa Barat. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 8(2): 221–236.

- Riska, S., Arini, Z.V., Purwanto, M. A. 2024. Peningkatan aksesibilitas asuransi syariah pada nelayan (Studi kasus Kecamatan Bantan, Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*. 1(3): 206-214. DOI: <https://DOI.org/10.62017/jimea>.
- Rona, M. 2020. *Sikap Nelayan Dan Strategi Peningkatan Keikutsertaannya Dalam Program Asuransi Di Kota Bandar Lampung*. Program Pascasarjana Universitas Lampung.
- Ribot, J.C., Peluso, N.L. 2003. A theory of access. *Rural Sociology*. 68(2): 153-181. DOI: [10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133](https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133).
- Saiful, M., Fitriyana, Fahrizal, W. 2022. Peran Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha di Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*. 1(2): 76-80.
- Salampessy, M.L., Nugroho, B., Kartodiharjo, H., Kusman, C. 2024. Kinerja institusi lokal dalam pengelolaan hutan mangrove pada skala kecil kepulauan: Studi kasus di Pulau Buano, Provinsi Maluku, Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*. 12(2): 296-232. DOI: <https://DOI.org/10.23960/jsl.v12i2.840>.
- Sari, I., Arief, A.A., Amri, A., Fachry, M.E., Wahid, A. 2022. Asuransi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan. *Ponggawa, Journal of Fisheries Socio-Economic*. 2(2): 91-103.
- Schmid, A. 2004. *Conflict And Cooperation: Institutional And Behavioral Economics*. Blackwell Publishing. London. 1-342.
- Scott, W.R. 2008. *Institutions And Organizations: Ideas And Interests*. 3rd ed. Sage Publications. Los Angeles, CA.
- Sembiring, M. 2012. *Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Suharti, S., Darusman, D., Nugroho B., Sundawati L. 2016. Kelembagaan dan perubahan hak akses masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. *Solidarity: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 4(2): 165-175. DOI: [10.22500/sodality.v4i2.13392](https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13392).
- Suwardjo, D., Haluan, J., Jaya, I., Soen'an, D., Poernomo, H. 2017. Keselamatan kapal penangkap ikan, tinjauan dari aspek regulasi nasional dan internasional. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 1(1): 1-13. DOI: [10.24319/jtpk.1.1-13](https://doi.org/10.24319/jtpk.1.1-13).

- Suyanto, B. 2013. *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya : Fakta Kemiskinan Masyarakat Pesisir Kepulauan, Perkotaan Dan Dampak Dari Pembangunan Di Indonesia*. Malang Intrans Publishing. Surabaya, Indonesia.
- Tavares, F.O., Santos, E., Tavares, V.C., Ratten, V. 2023. Risk planning and management in portuguese companies—a statistical approach. *Journal of Risk and Financial Management*. 16(7): 314. DOI: [10.3390/JRFM16070314](https://doi.org/10.3390/JRFM16070314).
- Velentina, R.A. 2018. Kebijakan pembiayaan bagi nelayan tradisional. *Masalah-Masalah Hukum*. 48(3): 184–197. DOI: [https://DOI.org/10.14710/mmh.47.3.2018](https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018).
- Vinezia, D. 2021. Identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas nelayan. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*. 3(1): 117–126. DOI: [10.37287/jppp.v3i1.345](https://doi.org/10.37287/jppp.v3i1.345).
- Wahyuni, S. 2023. *Riset Kualitatif: Strategi dan Contoh Praktis*. Penerbit: PT Kompas Media Nusantara. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yin, R.K., 2015. *Qualitative Research From Start To Finish*. 2nd edn, Guilford Press. New York.
- Yohansyah, K.R., Mananeke, L. 2020. Penentuan pemasaran berdasarkan analisa SWOT pada produk amanah di PT Pegadaian (Persero) Cp. Manado Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 8(4): 885–894. DOI: [https://DOI.org/10.35794/emba.v8i4.31167](https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31167).
- Yuliani, W. 2018. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 2(2): 83–91. DOI: [10.22460/q.v2i1p21-30.642](https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642).